

HARIAN LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

f lentera.tv

Lentera TV Media

Wasit Kontroversial, Indonesia Vs Bahrain Berakhir Ricuh

LAGA Timnas Indonesia vs Bahrain pada pertandingan Grup C Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Bahrain, Kamis (10/10/2024) berakhir ricuh. Kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf dinilai kontroversial. Hal paling krusial saat Timnas Indonesia tengah berjuang mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1. Tambahan waktu diplot 6 menit, namun wasit tak kunjung juga tiup peluit hingga menit ke-99. Akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumardji mendapatkan kartu merah karena protes. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong (STY) pun menyebut kepemimpinan wasit tersebut memalukan. (Reuters)



KOMISI & KABINET 'GEMUK' PERIODE 2024-2029

MILIKI 19 KEMENTERIAN BARU, DPR RI JADI 13 BIDANG KERJA

Sepuluh hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ada sekitar 19 kementerian baru dari total 46 kementerian yang akan dibentuk. Kementerian-kementerian baru itu kebanyakan merupakan pemisahan dari kementerian lama di kabinet Jokowi saat ini. Untuk mengiringi itu, DPR dipastikan juga menambah jumlah menjadi 13 bidang kerja. Secara resmi pengumuman akan dilakukan pada 14 Oktober 2024. Saat ini penambahan jumlah komisi itu tengah difinalisasi. Beberapa pihak berpendapat, dengan jumlah kabinet dan komisi jumbo maka anggaran pun akan ikut membengkak.

Baca Hal 11....



BOCORAN 46 KEMENTERIAN DI KABINET PRABOWO-GIBRAN

1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko Ekonomi
3. Kemenko PMK
4. Kemenko Marinves
5. Kemenko Kemasyarakatan
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian PAN-RB
11. Kementerian ATR/BPN
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Hutan
14. Kementerian Laut dan Perikanan
15. Kementerian Pekerjaan Umum
16. Kementerian Perumahan Rakyat
17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Desa PDT
19. Kementerian Transmigrasi
20. Kementerian Perdagangan
21. Kementerian BUMN
22. Kementerian Koperasi
23. Kementerian Perindustrian
24. Kementerian Pariwisata
25. Kementerian Ekonomi Kreatif
26. Kementerian UMKM
27. Kementerian Agama
28. Kementerian Sosial
29. Kementerian PPPA
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Ketenagakerjaan
32. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
33. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
34. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
35. Kementerian Pendidikan Tinggi
36. Kementerian Kebudayaan
37. Kementerian Pemuda dan Olahraga
38. Kementerian Keuangan
39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

40. Kementerian ESDM
41. Kementerian Lingkungan Hidup
42. Kementerian Investasi
43. Kementerian Hukum
44. Kementerian HAM
45. Kementerian Sekretariat Negara
46. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

BOCORAN SEMENTARA MITRA KERJA 13 KOMISI DI DPR

- KOMISI I**
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
 2. Kementerian Pertahanan
 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 4. Panglima TNI/Mabas TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
 5. Badan Intelijen Negara (BIN)
 6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
 8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
 9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
 10. Dewan Pers
 11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
 12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
 13. Lembaga Sensor Film (LSF)
- KOMISI II**
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertahanan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPPP)
 6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
 7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
 9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
 10. ANRI
 11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
 12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
 13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
- KOMISI III**
Pemegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

**Government (Hal.2)
Dibuka Peluang
Rumah Subsidi untuk
Pekerja Bergaji
Rp 12 Juta/Bulan**

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

KOMISI IV Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

KOMISI V Infrastruktur dan Perhubungan

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Lanjut di Hal 11...

Dibuka Peluang Rumah Subsidi untuk Pekerja Bergaji Rp 12 Juta/Bulan

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bicara peluang pekerja dengan gaji Rp 12 juta per bulan bisa mendapatkan rumah subsidi. Programnya bisa melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ya, saya kira langkah yang bagus. Sudah lama sebelumnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta. Dulu berapa dulu? Rp 4 juta atau Rp 5 juta? Ternyata Rp 8 juta, sekarang Rp 12 juta. Karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Pak Bas-begitu sapaannya-- ketika ditemui di Kementerian PUPR pada Kamis (10/10/2024).

Saat ini pekerja yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp 8 juta. Untuk memperkecil angka backlog, Basuki juga bilang perpanjangan waktu tenor dapat menjadi pilihan. Hal ini nantinya juga bisa memperkecil nominal cicilan.

"Karena kalau dulu, misalnya sekarang kita mengangsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi (jadi 40 tahun) dan cicilan Rp 2 juta itu kan kecil. Betul. Iya kan? Jadi relatif banget," lanjut Basuki.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Bonny Z. Minang menyebut masyarakat perlu diedukasi tentang kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Dia mencontohkan, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen dan tenor 40 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Basuki bilang tenor 40 tahun untuk FLPP bisa saja berjalan jika kebijakan pemerintah mengatur hal tersebut.

"Bisa aja. Kalau itu policy yang diterapkan oleh pemerintah, bisa aja," kata Basuki.



(ilustrasi) Rumah Subsidi untuk masyarakat.

Janji Pemerintah soal Masa Angsuran

Terpisah, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun. Hal ini disampaikan oleh Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Bonny Z. Minang.

Bonny mengungkapkan, tambahan unit FLPP ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema cicilan yang lebih terjangkau.

"Kuota FLPP sebelumnya ditargetkan 200 ribu unit per tahun. Satgas Perumahan menaikkan 100 ribu unit sehingga total menjadi 300 ribu unit. Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun," kata Bonny kepada wartawan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bonny mengatakan, masyarakat perlu diedukasi tentang kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Dia mencontohkan, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen dan tenor 40 tahun.

"Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300.000, cuma bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau dia panjang (tenor) 40 tahun, kamu nggak rugi. Kamu nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset," ungkapnya.

Pemerintah, menurut Bonny, juga mendorong peran sektor pengembang untuk berinovasi dalam menawarkan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel.

"Pasar perumahan ini tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Sektor perbankan dan pengembang harus cerdas dalam memberikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki



PERSOALAN PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK



Keterbatasan lahan di daerah perkotaan



Masyarakat pedesaan & pesisir banyak tinggal di rumah tidak layak huni



Generasi muda & tenaga kerja informal sulit mengakses hunian



Harga rumah di perkotaan tinggi padahal 56,7%* masyarakat tinggal di wilayah ini



REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG KEPEMILIKAN RUMAH



Mengencarkan perbaikan tata ruang, pemanfaatan lahan & kemudahan perizinan



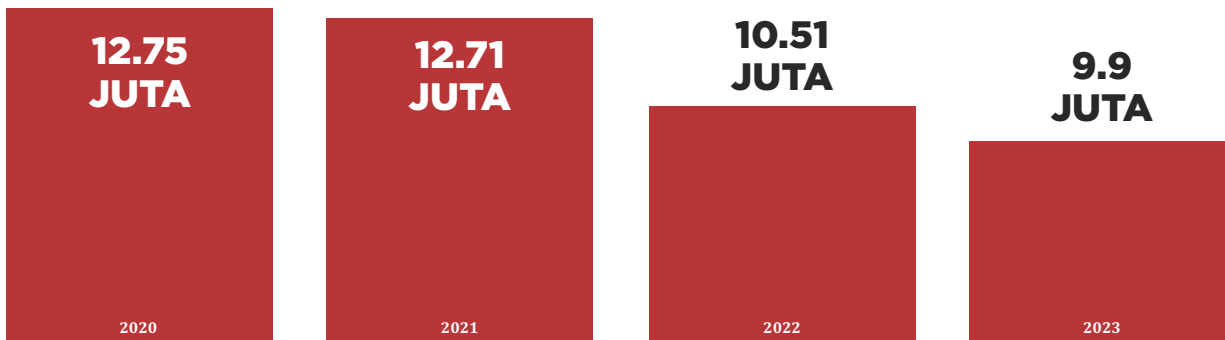
Melanjutkan program pengembangan penyediaan hunian terjangkau & perbaikan hunian



Meningkatkan kualitas & jangkauan transportasi publik

ANGKA BACKLOG MASIH TINGGI

Backlog adalah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.



Hadimuljono menyebut kuota rumah subsidi skema FLPP akan naik di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Basuki memastikan, kuota rumah subsidi pada pemerintahan Prabowo lebih banyak dibanding tahun 2024. Kementerian PUPR telah meminta tambahan kuota rumah subsidi dan akan dialokasikan oleh Kemenkeu.

"Sekarang ini kita lagi minta tambahan ke Kemenkeu. Kalau target (rumah subsidi) habis, berarti kan bagus karena itu BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara)," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

"Pasti lebih (daripada kuota FLPP tahun ini) karena programnya Pak Prabowo kan 3 juta rumah, jadi kita sesuaikan dengan itu," tambahnya.

Sejak 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 111.784 unit rumah senilai Rp 13,62 triliun yang tersebar di 33 provinsi, 387 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan. (wid, tls ist/dya)

Beralasan Hakim Sakit, Vonis Gugatan PDIP soal Lolosnya Gibran Jadi Cawapres Ditunda

JAKARTA-Sidang putusan gugatan yang dilayangkan oleh tim hukum PDIP terhadap KPU terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres ditunda.

Harusnya putusan tersebut dibacakan pada 10 Oktober 2024. Kini, sidang tersebut ditunda ke tanggal 24 Oktober 2024.

"Ditunda tanggal 24," kata pihak Humas PTUN Jakarta pada Kamis (10/10/2024).

Humas PTUN menyampaikan sidang ditunda lantaran ketua majelis hakim yang membacakan putusan sedang sakit. "Ketua majelisnya sedang sakit," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, tim hukum PDIP menggugat KPU terkait dengan pencalonan Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Gibran dianggap melanggar proses administrasi.

Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun, menuturkan pihaknya mengajukan permohonan ke PTUN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Salah satu poin gugatan yakni terkait KPU yang memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Gibran telah menanggapi soal gugatan tersebut. Pada 25 April 2024, ketika ia masih menjabat Wali Kota Solo, ia menyebutkan bahwa ia menunggu arahan Prabowo Subianto—Presiden terpilih, pasangannya di Pilpres. "Itu yang lain saja yang menanggapi ya, kita menunggu arahan dari Pak Prabowo," ujar Gibran.

PDIP Buka Suara

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara menyusul penundaan sidang putusan PTUN soal gugatan untuk mencabut penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy berharap putusan majelis hakim bisa berpegang pada tiga hal yakni, keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan.

"Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika majelis hakim membuat putusan," kata Ronny saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Sidang putusan itu ditunda selama dua pekan karena majelis hakim sakit.



Juru Bicara PTUN Jakarta, Irwan Mawardi. Ist

Ronny mendoakan agar majelis hakim segera pulih. Dia meyakini gugatan partainya memiliki fakta-fakta hukum yang kuat.

Ronny mengaku tak mempermasalahkan penundaan hingga dua pekan sidang putusan tersebut. Pihaknya hanya meminta agar hakim tetap independen.

"Jadi, kalau pun penundaannya sampai dua minggu, tidak ada masalah asal majelis hakimnya tetap independen dan berpegang kepada 3 unsur yang saya sebutkan dalam mengambil keputusan tersebut," katanya.

Dalam pokok perkara, PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal Keputusan KPU dimaksud. Selain itu, majelis hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali Keputusan KPU 360/2024.

Peluang Tanpa Oposisi

Di sisi lain, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat suara terkait pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang diprediksi tanpa oposisi.

Meskipun bakal tidak ada oposisi, JK meyakini terjadi perbedaan pendapat di internal pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Terjadi di dalam ya, akan terjadi perbedaan pendapatnya di dalam (pemerintahan)," kata JK kepada wartawan di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Oleh karenanya, JK meyakini ke depannya akan tetap ada kontrol terhadap rezim Prabowo-Gibran. Meskipun kritik itu akan hadir dalam

bentuk perbedaan pendapat yang terjadi di internal.

"Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada," ujarnya.

Sebelumnya pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi tidak akan memiliki oposisi apabila PDIP juga ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Saat ini hanya PDIP pemilik kursi di DPR yang belum bergabung ke Prabowo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya juga mengonfirmasi akan ada jatah di kabinet buat PDIP apabila jadi masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Muzani belum mengungkapkan nama maupun posisi kementerian untuk PDIP. Pada kesempatan itu, Muzani mengonfirmasi bahwa Prabowo sudah memanggil sebagian nama menteri.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merespons positif wacana partainya akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Menurut Hasto, PDIP hingga kini belum mengambil keputusan untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan. Dia mengadakan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Megawati Soekarnoputri.

"Untuk masuk di Kabinet, ini kan merupakan keputusan strategis yang harus melalui pertimbangan matang," kata dia usai mengisi kuliah Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta, Rabu (9/10/2024). (wid, rls, ist, ant/dya)

Tentang Pelantikan Prabowo-Gibran

- Jadwal pelantikan presiden 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam aturan tersebut, tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Umum (2024) setelah pen-coblosan dan penghitungan suara adalah:
 1. Penetapan hasil pemilu maksimal tiga hari setelah putusan MK.
 2. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (disesukan dengan akhir masa jabatan masing-masing.)
- Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2024.

Timeline Perubahan Aturan Pemilu

- **Perubahan Umur Pilpres di Mahkamah Konstitusi - 16 Oktober 2023**
Mahkamah Konstitusi meng-abulkan sebagian uji materi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan-nya, MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Perubahan Umur Pilkada di Mahkamah Agung - 29 Mei 2024**
Mahkamah Agung (MA) me-ngabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Dalam amar putusan ini, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.
- **Perubahan Umur dan Syarat Threshold di Mahkamah Konstitusi - 20 Agustus 2024**
Mahkamah Konstitusi mengabul-kan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai UU Pilkada pada Selasa, 20 Agustus 2024. Putusan ini mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, partai politik harus mengumpulkan minimal 22 kursi untuk bisa mengucap calon.

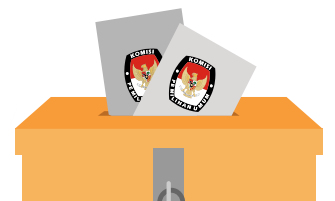


“

Jadi, kalau pun penundaannya sampai dua minggu, tidak ada masalah asal majelis hakimnya tetap independen dan berpegang kepada 3 unsur yang saya sebutkan dalam mengambil keputusan tersebut,"

”

RONNY TALAPESSY
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional



Sandra Dewi Klaim Tak Terima Uang dari Harvey Moeis, Ngaku Pisah Harta

JAKARTA-Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung), meminta artis Sandra Dewi menjelaskan pengiriman uang yang dilakukan suaminya, Harvey Moeis. Pertanyaan itu dicetuskan dalam persidangan dugaan korupsi pengolahan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk.

"Apakah setiap bulan terdakwa ini (Harvey) memberikan uang?" tanya hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Sandra menjelaskan suaminya tidak memberikan uang kepadanya. Harvey disebut cuma mengurus kebutuhan rumah tangga selama menikah.

"Seperti membayar listrik, air, gaji karyawan di rumah, suami saya mentransfer ke asisten pribadi saya," ucap Sandra.

Kebutuhan rumah tangga itu diurus oleh asisten pribadi. Sandra mengklaim kebutuhan pribadinya tidak dibiayai Harvey.

"Untuk kebutuhan sendiri saya bayar sendiri Yang Mulia," ujar Sandra.

Hakim mengaku bingung dengan jawaban itu. Sebab, Harvey memiliki kewajiban membiayai istrinya sebagai suami.

"Bukankah itu kewajiban suami, artinya setiap penghasilan suami kan diserahkan ke istri, umumnya kan begitu walaupun istri punya penghasilan?" kata hakim.

Namun, Sandra mengaku tidak keberatan. Sebab, dia memiliki penghasilan sendiri yang cukup membiayai kebutuhannya.

"Saya punya penghasilan yang cukup dari single sampai sekarang saya punya penghasilan yang cukup. Jadi saya lebih senang saya wanita yang mandiri Yang Mulia," ucap Sandra.

Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang. Tuduhan pertama, dia disangkakan merugikan negara Rp300 triliun.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Uang yang sudah diterima diduga disamarkan Harvey. Dia membeli sejumlah barang sampai mengirimkan



Aktris Sandra Dewi hadir sebagai saksi saat mengikuti sidang lanjutan korupsi tata kelola timah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Antara)

ke Sandra Dewi.

"Harvey Moeis (diduga melakukan) merupakan perbuatan menempatkan, menyembunyikan, atau menyamarkan sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi," kata jaksa.

Dalam pencucian uang ini, Harvey dibantu oleh Selebgram Helena Lim yang memiliki perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange. Uang rupiah uang ditukarkan suami Sandar Dewi itu menjadi dolar Singapura dan Amerika dalam periode 2018 sampai 2023.

Soal Deposit USD-SGD

Sandra Dewi juga mengaku tak tahu soal deposito dolar asing milik suaminya, Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah. Sandra mengatakan dirinya dan Harvey melakukan perjanjian pisah harta.

Hal itu disampaikan Sandra Dewi saat bersaksi dalam kasus korupsi pengelolaan timah. Terdakwa dalam sidang ini adalah Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sejak 2018, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak 2017.

"Saudara saksi tahu Pak Harvey pernah menyimpan dollar Singapura maupun dollar US di situ (deposit box)?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

"Saya kurang tahu, Pak, soalnya saya nggak ikut waktu itu," jawab Sandra.

Pada saat penyidikan ada pengeledahan kan ditemukan di deposit itu ada uang sebesar ada 40 gepok uang dolar, ada 100 lembar per gepoknya. Per lembarnya itu pecahan 100 USD. Totalnya 10.000 USD,

totalnya 400.0000 USD di deposit. Selain itu juga ada pecahan terkait uang dolar Singapura totalnya ada 81.401 SDG. Saudara tahu ini uang-uang siapa yang disimpan di deposit?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu, Pak," jawab Sandra.

Jaksa lalu mendalami kesaksian Sandra soal tabungan milik Harvey di sejumlah bank. Sandra mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Harvey terkait masalah uang.

"Kemudian Saudara saksi tahu tidak Pak Harvey punya tabungan di bank cabang Jakarta wisma bisnis?" tanya jaksa.

"Saya tahu punya tabungan bank tapi saya nggak tahu cabang mana," jawab Sandra.

"Kalau di cabang TCC Batavia tidak tahu?" tanya jaksa.

"Tidak," jawab Sandra.

"Saya tahu punya rekening di salah satu bank, tapi nggak tahu ada berapa rekening bank itu suami saya," imbuh Sandra.

"Pernah ada komunikasi dengan Pak Harvey?" tanya jaksa.

"Masalah keuangan tidak," jawab Sandra.

Jaksa juga mendalami aset di Senayan Residence dan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Sandra mengatakan dia dan Harvey memiliki perjanjian pisah harta.

"Terkait aset di Senayan Residence, di kaveling 16. Itu perolehannya kapan dan siapa yang melakukan pembelian?" tanya jaksa.

"Yang melakukan pembelian suami saya dan itu rumahnya atas nama suami saya," jawab Sandra.

"Tercatat atas nama Harvey Moeis?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Sandra.

"Terkait aset kalau di Pakubuwono bisa dijelaskan?" tanya jaksa.

"Untuk di Pakubuwono itu jadi kan

kami pisah harta tapi untuk rumah tinggal, yang pertama kami tinggal ketika setelah kami menikah kami sepakat untuk membeli bersama. Saya membayar uang muka beserta pajak notaris dan sebagainya, kemudian sisanya Pak Harvey yang bayar. Jadi kami beli bersama," jawab Sandra.

Hakim Salah Sebut Nama

Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto sempat salah saat menyebutkan nama artis Sandra Dewi dalam sidang kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/10/2024). Hal ini membuat Sandra melayangkan protesnya.

Hal ini bermula ketika hakim selesai menanyakan Sandra terkait sejumlah perhiasan miliknya yang disita penyidik Kejaksaan Agung karena diduga terkait dengan kasus korupsi timah.

"Ada lagi yang saudara terangkan?" tanya hakim.

"Udah, Yang Mulia," kata Sandra.

"Terangkan, atau mungkin ada permintaan, bagaimana? Silakan. Terhadap persidangan ini, kan suami saudara duduk sebagai terdakwa," ujar hakim.

"Iya," timpal Sandra.

"Kemudian, maaf ya, ini pers semua, netizen Indonesia menunggu," tutur hakim.

"Betul," sahut Sandra.

"Kapan ya gitu, saksi Dewi Sandra hadir," tambah hakim.

"Sandra Dewi, Yang Mulia," protes Sandra. Suasana ruang sidang seketika riuh.

Hakim lantas menyadari kesalahan penyebutan nama itu. Ia mengaku, sering tertukar antara Sandra Dewi dengan Dewi Sandra. Terlebih, nama istrinya yang juga mirip.

"Oh salah. Saya sering kebalik ya, Dewi Sandra dengan Sandra Dewi ya. Tapi nama istri saya sama dengan saudara, di depannya ada Diananya. Nama suami saya, Diana Chandra Dewi, suami saya," ujar hakim.

"Istri," ujar Sandra mengoreksi.

"Eh, apa istri saya," kata hakim meralat pernyataannya disambut tawa pengunjung sidang.

"Eggak nama istri saya sama gitu lho ya, ada Sandra Dewi-nya, tapi depannya Diana. (Bukan) Pakai s, pakai c-h, Chandra, seperti itu. Tapi saya sering kebalik namanya, Dewi Sandra," lanjut hakim.

"Padahal Dewi Sandra kan juga artis ya?" tanya hakim.

"Iya, teman saya juga, Yang Mulia," jawab Sandra. (Wid, rla, ant/dya)

Usai Pungli Terbongkar, Masih Ditemukan Miras dan HP di Rutan KPK

JAKARTA-KPK menyidak rutan yang mereka kelola sendiri. Sidak tersebut untuk mencegah adanya praktik yang berpotensi para tahanan dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK Togi Robson Sirait mengatakan, sempat menemukan handphone usai kasus pungutan liat atau pungli di rutan terungkap. Ia mengatakan, handphone itu merupakan sisa barang dari kasus pungli rutan yang belum dikeluarkan.

"Jadi temuan handphone itu terjadi setelah Karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga," kata Togi di Rutan Cabang Merah Putih KPK, Jakarta, (10/10/2024).

"Jadi itu handphone-nya handphone lama, masih sisa di situ belum dikeluarkan," ujar dia.

Togi mengatakan, petugas menemukan 4 buah handphone. Selain itu, petugas menemukan minuman keras (miras) saat proses pengecekan awal oleh petugas.

Miras tersebut disimpan di dalam botol plastik air mineral. "Jadi meja itu (meja di depan rutan) adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan. Di situ ada yang ngirim botol Aqua dengan merek yang sudah dilepas. Kita tanyakan, minah sudah kita sediakan ngapain kasih air putih. Begitu dibuka ternyata itu adalah air miras. Di situ yang kita dapatkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa miras tersebut ditemukan saat pemeriksaan awal, bukan ditemukan saat sidak. "Jadi perlu ditegaskan lagi, miras bukan ditemukan saat sidak ya. Jadi miras ditemukan saat pemeriksaan makanan mau masuk ke rutan, sehingga miras belum masuk ke rutan KPK," kata Budi.

Sebelumnya, Rutan KPK sempat menjadi sorotan seiring terungkapnya kasus pungli yang dilakukan petugas Rutan. Sebanyak 15 orang eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) didakwa melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.



KPK melakukan beberapa kegiatan sidak di rutan Rutan Gedung Merah Putih dan Rutan Gedung C1. (Dok. KPK)

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai "Lurah" dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Nawawi: KPK Seperti Bayi yang Tak Diinginkan

Terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menganggap lembaga antirasuah itu seperti bayi yang tak diinginkan untuk lahir di usianya yang sudah menginjak 22 tahun saat ini.

"Hampir tidak lahir sebenarnya bayi ini. Itu kemudian harus kita simpulkan bahwa memang tidak dikehendaki lahirnya bayi KPK ini," kata Nawawi di acara 'Indonesia Integrity Forum' di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Nawawi mengatakan hal demikian berdasarkan penelusuran atas anomali KPK terlihat ketika awal pembentukannya.

Ia menyoroti embrio KPK berasal dari pembentukan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menjelaskan Pasal 43 Ayat 1 di UU tersebut disebutkan KPK harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun setelah diundangkannya aturan tersebut.

Namun, ia mengatakan pendirian KPK tak langsung lahir dua tahun usai aturan tersebut diterbitkan. Justru KPK baru terbentuk pada 27 Desember 2002.

"Harusnya dia lahir pada 16 Agustus 2001, sebab Undang-Undang 31 tahun 1999 lahir pada 16 Agustus 1999. Ini dua tahun lewat

sebagaimana yang diperintahkan Undang-undang enggak lahir bayi ini," kata mantan hakim pengadilan tipikor itu.

"Lewat 1 tahun 4 bulan, tepatnya di 27 Desember 2002, baru bayi ini dilahirkan. Ada apa di masa 1 tahun 4 bulan itu?" tambahnya.

Nawawi mengatakan KPK kemudian lahir dengan sepak terjangnya yang begitu menggelora dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, ia menyoroti kiprah KPK dalam memberantas korupsi mulai terombang ambing seiring perjalanan waktu. Terlebih, munculnya momen revisi UU KPK pada 2019 lalu yang melemahkan lembaga ini. "Ironis gitu," kata dia.

Tak hanya itu, Nawawi kemudian membandingkan Undang-Undang lama KPK yakni Nomor 30 tahun 2002 mengatur dalam konsiderannya ada situasi korupsi sudah sedemikian yang luar biasa sehingga diperlukan metoda, strategi pemberantasan korupsi yang baru.

Di samping itu, lanjutnya, aturan itu disebutkan juga institusi penegakan hukum korupsi yang masih ada itu dianggap tidak efektif dan tak efisien.

"Atas dasar pertimbangan itu kemudian KPK itu dijadikan sebagai trigger mechanism bagi instansi yang sudah ada gitu. Jadi KPK menjadi semacam pemicu, pendorong dan lain-lain, trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan," kata dia.

Namun, ia menyoroti revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019 lalu tidak ada lagi istilah trigger mechanism bagi KPK. Istilah trigger mechanism itu, lanjutnya, justru diganti dengan istilah sinergitas.

"Ini harus kita artikan KPK bukan lagi lembaga yang dipakai untuk mendorong lembaga lain gitu. Tetapi KPK ini disejajarkan dengan kendaraan aparat penegak hukum

lainnya itu. Kita sama ketahu kalau tiga kendaraan ini jalan, KPK paling di belakang gitu," kata dia. (wid, rla, ist/dya)

Kantong Tebal Pelaku Pungli KPK

- Deden Rochendi selaku Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2017-2018 menerima senilai Rp 399.500.000;
- Hengki selaku Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK Tahun 2018 sampai Juni 2022 dan ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 01 Agustus 2022 menerima senilai Rp 692.800.000;
- Ristanta selaku Plt. Kepala Cabang Rutan KPK Tahun 2020-2021 dan Plh. Kepala Cabang Rutan KPK sampai Mei 2022 menerima senilai Rp 137.000.000;
- Eri Angga Permana selaku petugas Rutan KPK senilai Rp 100.300.000;
- Sopian Hadi selaku petugas Rutan KPK senilai Rp 322.000.000;
- Achmad Fauzi selaku Kepala Cabang Rutan KPK Periode Mei 2022 sampai 22 Februari 2024 menerima senilai Rp 19.000.000;
- Agung Nugroho selaku Petugas Rutan KPK - Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK Tahun 2022 sampai 2023 menerima senilai Rp 91.000.000;
- Ari Rahman Hakim selaku petugas Rutan KPK menerima senilai Rp 29.000.000;
- Muhammad Ridwan selaku staf bagian keamanan KPK menerima senilai Rp 29.000.000;
- Mahdi Aris selaku ASN di KPK bagian pengamanan menerima senilai Rp 29.000.000;
- Suharlan selaku staf bagian keamanan KPK, menerima senilai Rp 103.700.000;
- Ricky Rachmawanto selaku staf bagian keamanan KPK menerima senilai Rp 116.950.000;
- Wardoyo selaku staf bagian keamanan KPK menerima senilai Rp 7116.950.000;
- Muhammad Abduh selaku PNS menerima senilai Rp 94.500.000; dan
- Ramadhan Ubaidillah selaku PNS menerima senilai Rp 135.500.000.



Butuh Rp 187 M di 2025 untuk Penataan 5 TPS di Kota Malang



Petugas kebersihan DLH Kota Malang membersihkan sampah di salah satu TPS. (dok. DLH Kota Malang)

MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan memanfaatkan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Local Service Delivery Program (LSDP) untuk penataan 5 Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Anggaran untuk program LSDP akan bersifat dana talangan, di mana Pemkot Malang akan menggunakan dana APBD terlebih dahulu. Jika sesuai

dengan usulan, Pemkot Malang memerlukan sekitar Rp 187 miliar di APBD 2025 untuk pelaksanaan program ini.

Program LSDP ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2025 di TPS wilayah Sulfat, Muharto, Pandanwangi, Kedungkandang, dan Merjosari.

"Nah, ini kan awalnya saya ingin pakai dana Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi karena

ada program LSDP ini, lebih baik kita tuntaskan pakai program ini," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, Kamis (10/10/2024).

Iwan mengatakan, perubahan sumber dana ini dilakukan agar proyek lebih terintegrasi dengan program nasional, yang bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

"Mudah dengan program LSDP, pengolahan sampah di Kota Malang bisa terintervensi dengan baik. Karena ketersediaan anggaran dan arah programnya harus jelas. Aksinya di 2025 dan 2026," tambahnya.

Menurut Iwan, sistem pengangkutan sampah dari TPS yang masih dilakukan di tepi jalan, menjadi salah satu masalah yang perlu ditangani. Ke depan, melalui LSDP ini, Pemkot Malang akan menata ulang model TPS sehingga mobil pengangkut dapat masuk langsung ke dalamnya.

Selain itu, Iwan juga menekankan, penertiban jam pembuangan sampah ke TPS akan lebih diperketat tidak melebihi pukul 8.00 pagi. "Harapannya nanti pagi-pagi sekali, sekitar pukul 7, semua sampah sudah terangkut. Jadi masyarakat juga perlu kami edukasi nanti," katanya.

Lebih lanjut Iwan memastikan, sebagai bagian dari penanggungjawab program LSDP di Kemendagri, di 2025 nanti, akan dimulai pendampingan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kesiapan pelaksanaan proyek. (Santi/Dya)



Nah, ini kan awalnya saya ingin pakai dana Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi karena ada program LSDP ini, lebih baik kita tuntaskan pakai program ini,"

IWAN KURNIAWAN
Pj Wali Kota Malang

Atur Reward dan Punishment, Pemkab Malang Rancang Perbup Penghargaan ASN

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan fungsi penghargaan dan hukuman serta mendorong semakin banyak ASN berprestasi.



Selama ini, kami lebih fokus pada penegakan disiplin. Namun, penghargaan kepada ASN yang berprestasi juga harus berjalan seimbang dengan hukuman,"

ROIKHANA
Kepala BKPSDM
Kabupaten Malang

"Selama ini, kami lebih fokus pada penegakan disiplin. Namun, penghargaan kepada ASN yang berprestasi juga harus berjalan seimbang dengan hukuman," ujar Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Roikhana, Kamis (10/10/2024).

Dengan adanya Perbup nanti, Hana berharap kegiatan yang dijalankan dapat memiliki dasar hukum yang jelas. Baik itu pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi, ataupun pemberian sanksi jika ditemukan ASN yang menyalahi ketentuan kepegawaian. Menurut Hana, saat ini rancangan Perbup tersebut masih dalam tahap penyusunan.

"Nah makanya kami juga ada Anugerah ASN Berprestasi tahun ini, itu akan kami jadikan sebagai uji coba. Kami ingin memastikan rancangan perbup nanti bisa disahkan dan diterapkan dengan hasil yang maksimal," kata Hana.

Selain itu, penghargaan yang diberikan dalam Perbup ini juga akan

berlaku untuk perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan mendorong seluruh jajaran Pemkab Malang untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Hana menyebutkan pemberian penghargaan ataupun sanksi, direncanakan dilakukan setiap triwulan, sehingga dalam satu tahun akan ada empat kali momentum penghargaan bagi ASN dan perangkat daerah yang berprestasi.

Hal ini sejalan dengan aturan yang ada, sambungnya, di mana penilaian kinerja ASN dilakukan setiap triwulan, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri).

"Setiap perangkat daerah juga diwajibkan untuk memberikan penghargaan kepada ASN di masing-



Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto bersama para ASN di lingkungan Kabupaten Malang. (Santi/Lenteratoday)

masing unit, yang kemudian akan dilaporkan ke BKPSDM," terang Hana.

Dengan adanya Perbup Penghargaan ini, Hana juga mengharapkan ASN di lingkup Pemkab Malang akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. "Kami berharap pemberian penghargaan ini bisa memacu ASN untuk bekerja lebih baik, karena kinerja mereka akan diakui dan dihargai," pungkas Hana. (Santi/Dya)

OLIVIA RODRIGO

Donasi Penjualan Konser di Filipina untuk Organisasi Perempuan

OLIVIA RODRIGO seorang penyanyi pop mendonasikan seluruh hasil penjualan tiket konsernya kepada organisasi perempuan, Jhpiego, usai menggelar konser perdananya di Filipina.

Pop star muda Olivia Rodrigo baru saja selesai menggelar konser perdananya di Filipina sebagai rangkaian dari Guts World Tour yang telah berlangsung sejak 23 Februari 2024.

Konser ini diadakan di Philippine Arena, Manila pada tanggal 5 Oktober 2024 dan dihadiri oleh 55 ribu orang. Panggung ini menjadi salah satu panggung terbesar sepanjang Olivia berkarir.

"Telah memimpikan ini dari lama. Ini kali pertama saya di Filipina dan menjadi panggung terbesar saya!!!" tulis Olivia di akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu, (9/10/2024)

Olivia menyampaikan bahwa dia sangat bersemangat karena seluruh tiket yang sudah terjual dapat didonasikan ke Jhpiego, organisasi pemberdayaan perempuan di Filipina.

Jhpiego adalah sebuah organisasi nirlaba di bawah naungan John Hopkins University yang bergerak untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan, seperti mengatasi penyakit HIV/AIDS dan pencegahan penyebaran infeksi lainnya.

Dilansir dari eifoundation.org, kegiatan berdonasi ini merupakan salah satu agenda dari Fund 4 Good milik Olivia yang diluncurkan bersamaan dengan Guts World Tour.

Donasi ini dilakukan di sebagai komitmen untuk membangun masa depan yang setara dan adil bagi wanita dan anak perempuan melalui dukungan langsung terhadap lembaga nirlaba berbasis komunitas yang memperjuangkan pendidikan anak perempuan, mendukung hak reproduksi, dan mencegah kekerasan berbasis gender.

"Saya sangat bersemangat karena

seluruh penjualan tiket bersih tadi malam bisa didonasikan ke @jhpiego melalui Fund 4 Good. Saya sempat mendatangi organisasinya saat berada di Manila dan sangat terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para perempuan di Filipina. Ini adalah pertunjukan paling spesial dan perjalanan yang paling berarti. Bahkan mengatakan bahwa saya sangat bersyukur tidaklah cukup," tulis Olivia, dikutip (8/10/2024).

Olivia juga melakukan hal yang sama saat dirinya tengah tur di AS, Kanada, dan Eropa.

Untuk Guts world tour di AS, Olivia bermitra dengan National Network of Abortion Funds untuk memastikan para perempuan yang terkena dampak rasisme sistemik dan korban kebencian.

Saat di Kanada, Olivia mendukung Women's Shelter Canada sebagai tempat penampungan bagi wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan. Selain itu, di Eropa, Olivia mendukung aksi Women Against Violence Europe (WAVE) untuk memberikan tempat aman bagi wanita dan anak-anak hidup tanpa kekerasan.

Profil Olivia Rodrigo

Olivia Isabel Rodrigo (lahir 20 Februari 2003) adalah seorang penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat, yang terkenal dengan lagunya yang sangat emosional karena banyak bercerita tentang patah hati dan putus cinta dan dikenal karena perannya sebagai Paige Olvera di seri Disney Channel, Bizaardvark dan sebagai Nini Salazar-Roberts di seri Disney+, High School Musical: The Musical: The Series. Rodrigo menandatangani kontrak dengan label rekaman Interscope Records dan Geffen Records pada tahun 2020.

Rodrigo merilis single debutnya "Drivers Licence" pada Januari 2021, debut di nomor 1 Billboard Hot 100. lagu "Deja Vu" yang memuncak

di nomor tiga Billboard Hot 100, dan "Good 4 U" yang mencapai nomor satu di beberapa negara. Kemudian, Rodrigo merilis album studio solo debutnya. Sour (2021), yang menerima kritis yang baik dan kesuksesan komersial. Sour memenangkan berbagai penghargaan termasuk tiga Grammy Awards. Tahun berikutnya, Disney+ merilis film dokumenter Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U, yang mencatat proses kreatif Rodrigo dengan Sour dan telah melakukan Sour Tour. (nei,ist/dya)



Saya sangat bersemangat karena seluruh penjualan tiket bersih tadi malam bisa didonasikan ke @jhpiego melalui Fund 4 Good. Saya sempat mendatangi organisasinya saat berada di Manila dan sangat terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para perempuan di Filipina. Ini adalah pertunjukan paling spesial dan perjalanan yang paling berarti. Bahkan mengatakan bahwa saya sangat bersyukur tidaklah cukup,"

tulis Olivia, dikutip (8/10/2024).



MANFAAT DENGARKAN MUSIK UNTUK REDAKAN RASA SAKIT

MUSIK adalah salah satu bentuk seni yang paling universal dan kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, musik hadir hampir di setiap aspek,

mulai dari hiburan hingga terapi. Musik memiliki kemampuan untuk menyentuh emosi kita, memberikan inspirasi, dan bahkan membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Mendengarkan musik tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat membuat Anda lebih sehat, secara psikologis. Musik memiliki kekuatan untuk meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan bahkan membantu mengatasi rasa sakit.

Efek psikologis musik sangat luas. Musik dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran seseorang. Bahkan terdapat terapi musik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan emosional dan membantu mengatasi stres.

Dilansir dari Medical News Today, Rabu (9/10/2024), terapi musik sangat efektif untuk membantu orang yang kesulitan berkomunikasi secara verbal karena mendengarkan musik tidak mengharuskan orang untuk komunikasi dua arah secara langsung.

Kesulitan berkomunikasi secara verbal ini biasanya disebabkan oleh disabilitas, kondisi neurodegeneratif, seperti demensia, cedera otak, atau masalah kesehatan mental.

10 manfaat psikologis dari mendengarkan musik menurut verywellmind.com:

1. Musik Dapat Meningkatkan Kinerja Kognitif

Penelitian menunjukkan bahwa memutar musik saat sedang beraktivitas dapat meningkatkan kinerja tugas kognitif. Penelitian juga menemukan bahwa orang yang memutar musik dengan irama yang lebih cepat menghasilkan peningkatan kecepatan pemrosesan.

Dalam penelitian juga dikatakan memutar musik seperti instrumen dianggap lebih efektif untuk meningkatkan kinerja mental dibandingkan dengan lagu dengan lirik yang rumit dan berbelit karena

kemungkinan akan lebih mengganggu.

2. Musik Dapat Mengurangi Stres

Mendengarkan musik dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stres. Penelitian telah menemukan bahwa mendengarkan musik memiliki dampak pada respons stres manusia. Orang yang mendengarkan musik cenderung lebih cepat pulih setelah mengalami stress. Bukti juga menunjukkan bahwa musik yang berfrekuensi tinggi dapat melepas stress lebih baik

3. Musik Dapat Mempengaruhi Perilaku

Makan Penelitian menemukan emosi yang dirasakan saat mendengarkan musik dapat mempengaruhi perilaku makan seseorang. Misalnya, orang cenderung akan merasa minumannya jadi lebih manis dan lebih enak ketika menikmatinya dengan musik yang membawa energi positif.

4. Musik Dapat Meningkatkan Daya Ingat

Studi menemukan bahwa mendengarkan musik saat belajar dapat meningkatkan daya ingat seseorang. Hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis musik dan selera pendengar terhadap musik tersebut.

Penelitian juga menemukan bahwa seseorang dapat belajar lebih baik ketika mendengarkan musik yang positif. Hal ini disebabkan karena lagu-lagu tersebut memunculkan emosi yang lebih positif tanpa mengganggu pembentukan memori.

5. Musik Dapat Membantu Mengelola Rasa Sakit

Penelitian telah menunjukkan bahwa musik dapat membantu pengelolaan rasa sakit seseorang. Penelitian ini dilakukan kepada salah satu pasien fibromyalgia (penderita nyeri kronis).

Dalam penelitian tersebut, sang pasien mendengarkan lagu yang menyenangkan dan menyenangkan sesuai selera dan hasil membuktikan mendengarkan musik tersebut selama 1 jam sehari dapat membantu sang

pasien untuk mengurangi rasa sakit dan dapat meningkatkan mobilitas sang pasien. Selain itu, mendengarkan musik sebelum operasi juga dapat memberikan hasil yang baik dalam pengelolaan rasa sakit sang pasien.

6. Musik Dapat Membantu Tidur Lebih Baik

Tinjauan penelitian menemukan bahwa musik memiliki dampak yang baik pada kualitas tidur seseorang. Beberapa bukti juga menunjukkan bahwa musik dapat membantu seseorang tertidur lebih cepat dan bahkan menambah durasi tidur. Kebanyakan dari lagu yang dapat meningkatkan kualitas tidur ini adalah lagu-lagu yang berirama menenangkan.

7. Musik Dapat Meningkatkan Motivasi

Musik berirama cepat memotivasi orang untuk jadi lebih sering berolahraga. Studi menemukan orang akan berolahraga lebih lama saat mendengarkan musik.

Studi juga mengatakan mendengarkan musik bertempo cepat saat melakukan olahraga dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan kinerja olahraga seseorang. Dengan kata lain, orang tersebut tidak akan merasa sulit ketika melakukan olahraga yang berat.

8. Musik Dapat Meningkatkan Suasana Hati

Musik dapat membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Hal ini karena mendengarkan musik dapat mendorong pelepasan dopamin dan neurotransmitter yang berkaitan dengan perasaan menyenangkan. Perasaan senang ini juga didapat dari pengalaman menonton konser dan bermain alat musik.

9. Musik Dapat Mengurangi Gejala Depresi

Peneliti menemukan terapi musik dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi.

Terapi musik ini juga menjadi salah satu alternatif yang aman dan berisiko rendah untuk mengurangi kecemasan bagi orang yang menderita kondisi neurologis, seperti demensia, stroke dan penyakit parkinson.

10. Musik Dapat Meningkatkan Daya Tahan dan Performa Saat Berolahraga

Musik sangat berpengaruh pada peningkatan performa seseorang. Hal ini terjadi karena mendengarkan musik saat berolahraga dapat menurunkan persepsi seseorang terhadap kelelahan. Pikiran akan teralihkan oleh musik dan orang akan cenderung tidak menyadari tanda-tanda kelelahan yang nyata seperti peningkatan pernapasan, keringat, dan nyeri otot.

Musik memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia, mulai dari hiburan hingga terapi. Kemampuannya untuk mempengaruhi suasana hati, meningkatkan konsentrasi, dan menyatukan berbagai budaya menjadikan musik sebagai bagian kehidupan. (nei,ist/dya)



Kapsul Hidrogen Portabel Toyota: Baterai Masa Depan?

TOYOTA adalah salah satu pelopor dalam teknologi kendaraan ramah lingkungan, telah meluncurkan inovasi terbaru berupa kapsul hidrogen portabel. Inovasi ini dianggap sebagai solusi potensial untuk kebutuhan energi masa depan, terutama dalam konteks keberlanjutan dan efisiensi.

Kapsul hidrogen portabel adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan hidrogen yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Dengan ukuran yang kompak, kapsul ini dapat dengan mudah dipindahkan dan digunakan sebagai sumber energi alternatif, baik untuk kendaraan maupun perangkat lain yang membutuhkan listrik.

Meskipun adopsi kendaraan listrik terjadi lebih lambat daripada yang diantisipasi oleh banyak produsen mobil, mereka telah meninggalkan kendaraan sel bahan bakar. Namun, Toyota belum siap untuk menyerah dan akan memamerkan sejumlah pengembangan terkait hidrogen di Japan Mobility Show Bizweek 2024.

Berita besarnya adalah Toyota akan memperkenalkan cartridge hidrogen portabel berbentuk kapsul di Jepang untuk pertama kalinya, lapor Carscoops, Selasa (8/10/2024).



Seperti namanya, produsen mobil ini mampu mengurangi ukuran dan berat tangki hidrogen untuk membuatnya portabel (mudah dibawa).

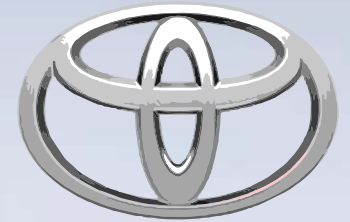
Hal ini bertujuan untuk menjadikan hidrogen sebagai yang mereka sebut "sumber energi yang familiar dan aman dan dapat digunakan dalam berbagai situasi sehari-hari".

Kapsul hidrogen dibayangkan memiliki sejumlah kegunaan seperti menyalakan sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik atau untuk memasak dengan membakar gas hidrogen.

Berbicara tentang yang terakhir, Toyota bekerja sama dengan Rinnai Corporation untuk mengembangkan kompor bertenaga hidrogen.

Yang lebih menarik lagi, Toyota membayangkan bahwa kapsul hidrogen dapat digunakan seperti baterai AA raksasa.

Seperti yang terlihat pada salah satu gambar, pemilik FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) dapat menukar wadah untuk "mengisi bahan bakar". Tampaknya perusahaan juga melihat



TOYOTA

kapsul hidrogen portabel sebagai cara untuk memberi daya pada bangunan dan pos-pos terpencil.

Selain kapsul hidrogen, Toyota juga akan memamerkan mobil balap GR Corolla bertenaga hidrogen. Mobil ini telah berkompetisi dalam balapan ketahanan sejak tahun 2023.

Terakhir, produsen mobil ini juga akan menampilkan "sistem penyimpanan energi sapanu" yang menggunakan baterai yang dipulihkan dari kendaraan listrik yang sudah habis masa pakainya.

Toyota mengatakan bahwa berbagai jenis baterai bekas dengan tingkat kerusakan yang berbeda dapat digunakan kembali untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan energi yang tersisa dari setiap baterai.

Mereka juga menyebut akan berkontribusi pada pasokan listrik yang stabil dan penyebaran energi terbarukan yang dikombinasikan dengan tenaga surya, angin, dan sistem pembangkit listrik energi terbarukan lainnya.

(nei,ist/dya)



5 Desa Wisata Menarik di Mandalika Untuk Liburan di Lombok

MANDALIKA adalah destinasi wisata yang terletak di Lombok, Indonesia, dan terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pantai-pantainya yang memukau.

Daerah ini juga dikenal sebagai kawasan wisata yang sedang berkembang, dengan infrastruktur yang semakin baik dan berbagai fasilitas untuk pengunjung.

Pengembangan Mandalika sebagai kawasan wisata premium memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Dengan investasi besar dari pemerintah dan sektor swasta, Mandalika kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti resort mewah, hotel berbintang, pusat kebugaran, serta lapangan golf.

Mandalika enggak hanya dikenal dengan pantai atau sirkuitnya yang jadi lokasi ajang balap dunia MotoGP. Salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) satu ini juga memiliki deretan desa wisata yang menarik disambangi.

Desa-desanya ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal yang kaya, seni tradisional, serta kerajinan khas Lombok. Menariknya lagi, lokasinya tak jauh dari Mandalika.

1. Desa Sade, Lombok

Dihuni oleh suku asli Lombok, yaitu Suku Sasak, Desa Sade hanya berjarak 30 menit dari sirkuit Mandalika.

Keunikan desa wisata ini adalah bangunan rumah yang masih tradisional. Atapnya terbuat dari ijuk jerami, dindingnya dari bambu, dan lantainya dari campuran getah pohon, abu jerami, serta tanah liat.

Di sini, pengunjung dapat melihat langsung kehidupan masyarakat Sasak yang masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur.

Wisatawan juga bisa belajar tentang tenun ikat khas Lombok yang dibuat oleh para wanita desa.

2. Desa Ende

Bersebelahan dengan Desa Sade, Desa Ende merupakan desa wisata selanjutnya yang berada tidak jauh dari Sirkuit Mandalika.

Terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Desa Ende juga enggak kalah dari desa-desa lainnya. Begitu masuk ke desanya, kamu bisa menemukan jejeran rumah beratapkan ilalang dan berinding anyaman bambu.

Keunikan lainnya adalah perempuan di Desa Ende juga diwajibkan bisa menenun sejak kecil, bahkan ini menjadi syarat wajib menikah. Warga desa ini juga sering melakukan ritual meminta hujan, yaitu Tari Peresean. Variatif banget, ya?

3. Desa Sukarara

Dikenal sebagai desa penghasil kerajinan paling populer di Lombok, Desa Sukarara merupakan destinasi berikutnya yang menarik buat disambangi.

Di desa ini terdapat pusat kerajinan tenun yang menghasilkan kain tenun berkualitas tinggi. Tak heran kalau Desa Sukarara juga dijuluki sebagai desa tenun.

Menariknya, produknya bahkan sudah tembus pasar internasional, lho. Bukan hanya kerajinan tangan, desa ini juga kental dengan budaya Suku Sasak yang bisa kamu jumpai, mulai dari rumahnya, hingga pakaian warganya.

4. Desa Bilebante

Dikenal sebagai Desa Wisata Hijau yang berfokus pada ekowisata dan wisata berbasis alam, desa ini memiliki lanskap alam yang indah, dengan

persawahan yang hijau dan udara yang segar.

Wisatawan dapat menikmati aktivitas, seperti bersepeda, berjalan di tengah sawah, dan berinteraksi dengan penduduk lokal yang mempraktikkan pertanian organik.

5. Desa Tetebatu

Desa Tetebatu sering disebut sebagai "Ubudnya Lombok", karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Desa ini berada di kaki Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh sawah hijau, hutan tropis, dan air terjun.

Desa Tetebatu juga menawarkan pengalaman budaya Sasak dengan pertunjukan tari dan seni lokal.

Ada pula aktivitas seru yang bisa kamu lakukan di sini, mulai dari berendam di Air Terjun Sarang Walet yang jernih dan segar, jalan santai di sekitar kaki Gunung Rinjani, hingga menikmati indahnya senja di Bumi Perkemahan. Selain itu, ada wisata ramah lingkungan yang wajib dicoba, yaitu eco farm atau ikut belajar proses pembuatan kopi atau minyak kelapa khas Lombok secara tradisional. (nei,ist/dya)



DESA SADE



DESA ENDE



DESA SUKARARA



DESA BILEBANTE



DESA TETEbatu

Komisi & Kabinet ... (dari Hal 1)

PENGESAHAN RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tampaknya langsung dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintahan baru.

Revisi ini memberi kebebasan bagi Prabowo untuk menambah jumlah kementerian setelah dilantik jadi presiden pada 20 Oktober mendatang.

Setidaknya ada 19 kementerian baru dari total 46 kementerian akan dibentuk di pemerintahan Prabowo.

Mereka di antaranya Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.

Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan.

Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Prabowo sempat melemparkan kode nantinya akan banyak menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali menjabat di kabinetnya.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo di acara BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa nomenklatur sebagian kementerian untuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang akan diketahui, Jumat (11/10/2024).

Hal itu, kata dia, karena hari Jumat tersebut tahap finalisasi komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi-komisi di DPR RI akan selesai. Sementara itu, komposisi AKD akan secara resmi diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2024.

"Mungkin sebagian nomenklatur kementerian sudah, sebagian belum," kata Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dasco menjelaskan bahwa nama-nama terkait dengan komposisi maupun pimpinan komisi bakal muncul dari fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.

Sebagai pimpinan DPR RI, dia masih menunggu hal tersebut. Di samping itu, Dasco masih belum bisa memastikan isu bahwa anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang disebut bakal menjadi Ketua Komisi III DPR RI.

"Saya enggak tahu karena itu 'kan akan keluar dari fraksi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa DPR RI telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menyesuaikan dengan pos-pos kementerian pemerintahan mendatang menjadi 13 komisi dan adanya badan baru yang akan dibentuk.

Ia mengatakan bahwa pembentukan AKD baru di DPR RI itu dimaksudkan agar kerja-kerja menjadi lebih efektif, menyusul adanya rencana penambahan pos kementerian pada pemerintahan mendatang.

DPR RI pun berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR RI pada tanggal 14 Oktober sebelum pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024.

Anggaran Ikut Membengkak

Di sisi lain, wacana tersebut bakal membuat anggaran membengkak. "Tambahan jumlah Komisi jelas akan berdampak pada penambahan anggaran. Anggaran DPR akan turut membengkak, walaupun tidak ada jaminan penambahan Komisi akan otomatis meningkatkan kinerja," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

Lucius mengatakan dampak lainnya adalah membuat parlemen tak bekerja maksimal. Sebab, terlalu banyak komisi bakal membuat beban koordinasi semakin bertambah.

"Dan itu selalu potensial memunculkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan," ungkap dia.

Ia menjelaskan, urgensi penambahan Komisi tentu untuk merespon bertambahnya jumlah kementerian lembaga di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Namun, penambahan komisi tak perlu direspons jika jumlah kementerian lembaga tak terlalu banyak.

"Akan tetapi kalau Kementerian hanya bertambah 1 atau 2 saja, ya mungkin semangat menggabungkan DPR menambah Komisi ngga perlu dilakukan," ujar dia.

Apabila penambahan kementerian terealisasi, secara otomatis bakal menambah mitra kerja DPR, memperluas cakupan pengawasan dan pengambilan

keputusan parlemen.

Selain itu, DPR baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pengesahan ini membuka jalan bagi terbentuknya kabinet yang lebih besar di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dengan langkah ini, kabinet jumbo semakin mungkin terbentuk, memancing beragam respons publik dan pengamat politik.

Diketahui, dalam RUU tersebut, ada sejumlah hal utama yang diubah adalah perubahan penetapan jumlah kementerian. Kekinian jumlah kementerian tak lagi dibatasi 34 kementerian, tapi diserahkan kepada presiden sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan.

"Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," bunyi Pasal 15 RUU Kementerian Negara.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa jumlah kursi kabinet Prabowo-Gibran akan terdiri dari 46 menteri. Politikus Senior Golkar Bambang Soesatyo (Bamsot) mengaku mendengar obrolan "warung kopi" yang menyebut akan ada 44 menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika jumlah kursi kabinet pemerintahan Prabowo benar 44 kursi, maka angka tersebut naik 29,4% dari jumlah kursi kabinet pemerintahan Jokowi sebesar 34 kursi.

Dalam sejarah Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet mengalami naik turun. Di Era Soekarno pernah ada masa di mana kabinet berisi 132 menteri dan pejabat setingkat menteri.

Kabinet Era Orde Baru yang dipimpin Soeharto memiliki jumlah menteri sekitar 24-44.

Jumlah menteri terbanyak ada di Era Kabinet Dwikora II yang terdiri dari 86 kementerian/lembaga yang diisi oleh 132 orang. Termasuk di dalamnya beberapa orang mengisi pos yang sama seperti Pemeriksa Keuangan Agung Muda (4 orang) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Gotong Royong (4 orang).

Selain Presiden Soekarno, Kabinet Dwikora II juga dipimpin oleh Perdana Menteri (Soekarno) dan juga empat Wakil Perdana Menteri.

Susunan kabinet Indonesia terus berevolusi sehingga diisi 34 menteri dan setingkat menteri. Termasuk dalam pejabat setingkat menteri adalah Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. (wid, rls, ist, ant/dya)

BOCORAN SEMENTARA MITRA KERJA 13 KOMISI DI DPR

Lanjutan dari hal 1...

KOMISI VI Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi (DEKOPIN)

KOMISI VII Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekrif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

KOMISI VIII Agama, sosial, dan Perempuan dan Anak

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

KOMISI IX Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMP2TKI)
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

KOMISI X Pendidikan, Olahraga, dan Riset

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

KOMISI XI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menorer, Sektor Jasa Keuangan

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

KOMISI XII Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII Hukum dan HAM

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

BADAN ANGGARAN

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Singgung Israel, Prabowo Ungkap Dugaan Iran Sudah Uji Coba Nuklir

JAKARTA-Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung kondisi dunia internasional dalam pidato di depan kader PKB. Prabowo menyinggung konflik timur tengah antara Israel dan Iran.

"Israel mengatakan akan menyerang Iran, Iran katakan siap menerima dan akan membalas besar-besaran. Diduga Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir, jadi kalau enggak ada kearifan negara besar, dunia dalam keadaan tidak baik," kata Prabowo di Grand Sahid Jakarta, Kamis (10/10).

Prabowo kemudian menyinggung tindakan Israel dan Iran yang dinilai membahayakan dunia. "Sikap seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan sangat rawan," jelas dia.

Prabowo menyebut, melihat kondisi dunia saat ini, Indonesia mesti bersyukur hidup dalam kedamaian.

"Ibu kota tidak dibom, anak-anak bisa ketawa walaupun sebagian susah, kita bersyukur kita masih punya, negara partai berbeda, masih bisa duduk bicara tukar pandangan, kita bersyukur kita menghormati perbedaan kita berbeda bisa kumpul, bisa kerja sama," ucap dia.

Sebelumnya, dia menegaskan negara harus swasembada energi. Hal ini untuk mengantisipasi dampak konflik Israel-Iran yang menimbulkan krisis bahan bakar.

"Kita harus swasembada energi, kita tidak bisa lagi tergantung impor bahan bakar atau terjadi krisis, sama lagi sekarang Israel akan menyerang ladang minyak Iran," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu) 9/10/2024).

Prabowo mengingatkan potensi buruk bila ladang minyak diserang. Harga minyak dunia akan melambung tinggi.

Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Prabowo menyinggung soal pemanfaatan kelapa sawit yang menghasilkan produk biosolar.

"Sekarang ada teknologi kita bisa bikin solar dari kelapa sawit, bahkan tidak hanya B35, B40, B50, kita bisa bikin D100, bensin bisa juga dari kelapa sawit," ujar Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki bangsa. Hilirisasi telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laut Merah Membara Lagi

Dua kapal melaporkan serangan di Laut Merah. Ini terjadi di waktu yang berdekatan, Kamis (10/10/2024).

Pertama terkait kapal yang sedang berlayar Jeddah, Arab Saudi, menuju



Dua kapal melaporkan serangan di Laut Merah Kamis (10/10/2024). Pertama kapal yang sedang berlayar kenJeddah, Arab Saudi, menuju Muscat, Oman. Kedua, kapal tanker kimia berbendera Liberia. (ist)

Muscat, Oman. Dua ledakan terdengar di dekatnya.

"Awak kapal dilaporkan selamat. Kapal-kapal diimbau untuk berhati-hati saat transit dan melaporkan aktivitas mencurigakan," kata Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO).

Kedua, serangan juga terjadi ke kapal tanker kimia berbendera Liberia. Kapal itu dihantam di anjungannya, dan menyebabkan kerusakan ringan.

"Nakhoda kapal melaporkan telah dihantam oleh proyektil tak dikenal dan kapal mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada kebakaran atau korban yang dilaporkan," ujar UKMTO lagi.

Ambrey, sebuah firma keamanan maritim, mengatakan kejadian ini terjadi 73 mil laut barat daya Hodeida. Kota pelabuhan itu dikuasai kelompok proksi Iran, Houthi.

Houthi adalah bagian dari "poros perlawanan" di Arab, yang bersekutu dengan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, Palestina. Houthi sebelumnya telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November sebagai bentuk protes atas serangan Israel ke Gaza.

Serangan itu telah mengganggu perairan yang membawa 12% perdagangan global. Hal ini memicu serangan balasan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris terhadap Houthi.

Dalam lebih dari 100 serangan selama hampir setahun, empat pelaut tewas dan dua kapal tenggelam. Sementara satu kapal dan awakannya masih ditahan sejak dibajak November lalu.

Diketahui, dalam forum internasional, Netanyahu menunjukkan dua buah peta Israel dan kawasan sekitarnya. Dalam peta itu, tidak ada sama sekali nama maupun wilayah Palestina. Upaya Israel untuk mengubah tatanan kekuasaan regional dan merestrukturisasi peta politik bukanlah hal baru.

Namun, dinamika kawasan yang

semakin kompleks dan eskalasi konflik pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan direspons dengan serangan Israel ke Gaza selama 12 bulan terakhir telah meyakinkan banyak pihak di Israel bahwa tujuan tersebut kini lebih realistis untuk

dicapai.

Peta yang dinamai "karunia" itu memuat negara-negara mencakup Mesir, Sudan, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Bahrain, dan Yordania.

Sedangkan peta kedua menunjukkan wilayah yang diwarnai hitam. Netanyahu menyebutnya sebagai wilayah "kutukan".

Peta itu mencakup Iran dan sekutunya di wilayah tersebut: Suriah, Irak, dan Yaman, serta Lebanon.

Dalam pidatonya baru-baru ini, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memperingatkan tentang apa yang disebutnya sebagai "ambisi penuh kebencian Israel."

Erdogan mengatakan, "Mereka [Israel] akan menginginkan tanah air kita di antara Tigris dan Efrat. Dan secara terbuka menyatakan melalui peta yang mereka tunjukkan bahwa mereka tidak akan puas dengan Gaza." (Wid, rlas, afp, rtr/dya)

bankjatim

Segenap Dewan Komisaris, Jajaran Direksi dan Pekerja
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Mengucapkan

**JAWA TIMUR BERSATU
BERSAMA UNTUK MAJU**
12 Oktober 1945-2024

ADHY KARYONO
Pj. Gubernur Jawa Timur

ISYE ADHY KARYONO
Pj. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur

**Selamat Hari Jadi
Provinsi Jawa Timur ke - 79**

Jawa Timur Bersatu Bersama untuk Maju

Bank Jatim bermitra & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta menaungi palangia perantara LPS

WWW.BANKJATIM.CO.ID